

GLOBALISASI VS PROTEKSIONISME: TANTANGAN BARU DALAM PERDAGANGAN DUNIA PASCA PANDEMI

Yasmin Azahra¹, Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz² Fadhli Suko Wiryanto³

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2310116061@mahasiswa.upnvj.ac.id¹ mfaizandreazf@upnvj.ac.id²
fadhliukowiryanto@upnvj.ac.id³

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap dinamika perdagangan internasional. Di satu sisi, globalisasi mendorong integrasi ekonomi lintas negara melalui perdagangan bebas, investasi, dan rantai pasok global. Di sisi lain, proteksionisme kembali menguat ketika banyak negara memperketat kebijakan ekspor-impor untuk melindungi industri domestik dan menjamin ketersediaan barang strategis. Artikel ini membahas bagaimana tarik-menarik antara globalisasi dan proteksionisme semakin menonjol pasca pandemi, dengan fokus pada tren global serta implikasinya bagi Indonesia. Kajian ini menyoroti kebijakan perdagangan pasca pandemi, tantangan rantai pasok global, serta strategi yang dapat diambil Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keterlibatan dalam ekonomi global.

Keywords: *globalisasi, proteksionisme, perdagangan internasional, pandemi, Indonesia*

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 140
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. INTRODUCTION

Selama beberapa dekade terakhir, globalisasi sering dipandang sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia. Liberalisasi perdagangan, arus investasi, serta kemajuan teknologi telah mempercepat integrasi negara-negara berkembang ke dalam sistem ekonomi global. Harapannya, integrasi tersebut mampu mencipta

kan kemakmuran yang merata. Namun, dalam praktiknya, manfaat globalisasi lebih banyak dinikmati oleh sebagian kecil negara dan kelompok masyarakat, sementara kesenjangan ekonomi justru semakin melebar.

Perdagangan internasional saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun di dunia. Dalam era globalisasi, tidak ada satu pun negara yang mampu sepenuhnya berdiri sendiri tanpa menjalin hubungan dagang dengan negara lain, termasuk negara-negara yang menganut sistem tertutup seperti Korea Utara dan Kuba, yang tetap membutuhkan barang dari luar negeri. Keberagaman sumber daya alam dan manusia antarnegara menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pertukaran barang dan jasa lintas batas.

Globalisasi ekonomi telah mendorong pertumbuhan ekspor dan impor sebagai indikator penting dalam aktivitas perdagangan internasional. Namun, kinerja perdagangan antarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh tarif atau kebijakan perdagangan, melainkan juga oleh efisiensi pelayanan dan tingkat birokrasi dalam suatu negara. Dalam praktiknya, perjalanan perdagangan global tidak selalu berjalan mulus. Faktor eksternal seperti bencana atau kejadian tak terduga, seperti pandemi COVID-19, menjadi tantangan besar yang mengguncang stabilitas perdagangan dunia.

Bahkan sebelum pandemi COVID-19, ekonomi global sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pertumbuhan melambat, perdagangan dan investasi menurun, utang publik maupun swasta meningkat, sementara kesenjangan sosial-ekonomi semakin tajam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses globalisasi yang dianggap kokoh ternyata menyimpan kelemahan struktural yang membuat banyak negara sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Pandemi kemudian memperdalam kerentanan tersebut. Tahun 2020 mencatat kontraksi ekonomi global terbesar dalam sejarah modern, Pandemi COVID-19 yang secara resmi dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada Maret 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem perdagangan internasional. Banyak negara menerapkan kebijakan **lockdown**, menutup akses keluar-masuk barang dan manusia melalui jalur udara dan laut. Hal ini menyebabkan penurunan drastis volume perdagangan, khususnya pada sektor non-migas, yang tercatat turun tajam pada tahun pertama pandemi. Hambatan perdagangan antarnegara semakin besar seiring diberlakukannya pembatasan perjalanan dan pengamanan perbatasan oleh banyak negara. dengan penurunan perdagangan internasional hingga hampir 10 persen dan arus investasi asing yang jatuh drastis. Dampaknya dirasakan langsung melalui hilangnya ratusan juta pekerjaan, meningkatnya kemiskinan, serta terganggunya rantai pasok dunia. Krisis ini menegaskan bahwa interkoneksi ekonomi global, yang sebelumnya dipuji sebagai keunggulan utama globalisasi, juga dapat menjadi sumber kerentanan yang serius.¹

Situasi tersebut memicu bangkitnya proteksionisme di berbagai negara. Pemerintah mengambil peran lebih besar dalam mengatur perekonomian, mengamankan pasokan domestik, serta memperpendek rantai produksi global demi menjaga stabilitas nasional. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari dominasi pasar bebas menuju intervensi negara yang lebih aktif. Tarik-menarik antara arus globalisasi dan kebijakan proteksionisme inilah yang kini menjadi tantangan utama perdagangan dunia pasca pandemi, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia.²

2. THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESES

Globalisasi sering dipahami sebagai proses yang menyatukan perekonomian dunia melalui perdagangan, arus modal, teknologi, dan tenaga kerja. Meski demikian, tidak semua negara dan kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa globalisasi kerap memicu ketimpangan, terutama di negara berkembang, karena ada perbedaan kemampuan dalam mengakses pasar global dan mengelola daya saing³

¹ Nitsch, V. (2022). *Economic effects of lockdown and trade restrictions during pandemics*

² UNCTAD, *ibid.*, hlm. 20-22.

³ Gozgor, G., & Ranjan, P. (2020). *Globalisation, inequality and redistribution: Theory and evidence*. *The World Economy*, 40(12), 2704-2751.

Kajian lain di kawasan Asia juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditopang globalisasi justru memperlebar kesenjangan pendapatan, termasuk di Indonesia, Hal ini memperlihatkan bahwa globalisasi selain membuka peluang, juga membawa kerentanan yang bisa menimbulkan resistensi sosial maupun ekonomi.

Resistensi ini kemudian melahirkan kebijakan proteksionisme. Teori proteksionisme menjelaskan bagaimana negara mengambil langkah melindungi industri domestik dari tekanan eksternal melalui berbagai instrumen seperti tarif, kuota, hingga pembatasan ekspor-impor. Proteksionisme tidak hanya dipahami dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai reaksi politik terhadap dampak globalisasi yang dianggap merugikan. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena perang dagang dan kebijakan tarif dalam hubungan bilateral merupakan wujud nyata dari respons negara ketika integrasi global menimbulkan kerentanan ekonomi domestik⁴. Dengan demikian, proteksionisme dapat dipandang sebagai strategi pertahanan ekonomi ketika mekanisme pasar global tidak mampu menjamin stabilitas.

Dalam kajian perdagangan internasional, teori-teori klasik masih menjadi pijakan utama untuk memahami interaksi ekonomi antarnegara. Adam Smith memperkenalkan konsep *keunggulan absolut*, yaitu suatu negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan lebih efisien dibanding negara lain, dan mengimpor barang yang produksinya kurang efisien. Pemikiran ini kemudian disempurnakan oleh David Ricardo melalui teori *keunggulan komparatif*. Ricardo menegaskan bahwa perdagangan tetap memberikan keuntungan bersama, meskipun sebuah negara tidak memiliki keunggulan absolut, asalkan ia tetap memproduksi barang dengan biaya relatif lebih rendah dibanding komoditas lain. Perkembangan selanjutnya datang dari Heckscher dan Ohlin yang menekankan pada perbedaan ketersediaan faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam) sebagai penentu pola perdagangan antarnegara.

Jika suatu negara kaya sumber daya alam dan tenaga kerja, maka produk berbasis faktor tersebut akan mendominasi ekspor. Bukti empiris di Indonesia selama tiga dekade terakhir menunjukkan kecenderungan tersebut: ekspor masih didominasi komoditas sumber daya alam dan produk padat karya, sesuai dengan kerangka teori Heckscher-Ohlin. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun konteks global terus berubah, dasar teori perdagangan internasional tetap relevan untuk menjelaskan posisi dan pola dagang Indonesia di era modern.

Pandemi COVID-19 menjadi faktor eksternal yang mengubah dinamika perdagangan global. Baldwin dan Evenett menekankan bahwa krisis kesehatan global mendorong banyak negara untuk mengambil langkah protektif dan berfokus ke dalam negeri dengan alasan menjaga ketahanan ekonomi. Rodrik juga berpendapat bahwa globalisasi memiliki batasan, karena pada akhirnya negara tetap perlu menjaga kedaulatan ekonomi dan sosialnya. Pandemi membuktikan tesis tersebut: ketika rantai pasok global terganggu, negara-negara lebih memilih melindungi pasar domestik meskipun langkah itu bertentangan dengan semangat liberalisasi perdagangan.

Dengan demikian, kerangka teoritis ini dibangun atas empat pilar: globalisasi yang membawa integrasi sekaligus ketidakmerataan, proteksionisme sebagai respons atas kerentanan tersebut, teori perdagangan internasional klasik yang menjelaskan dasar pertukaran antar negara, serta teori krisis global yang memperlihatkan bagaimana pandemi mendorong perubahan pola perdagangan dunia. Keempatnya memberikan fondasi untuk

⁴ Fadilah, C. N., dkk. (2021). *Perang Dagang dan Proteksionisme: Kajian Ekonomi Politik atas Kebijakan Tarif dalam Hubungan Dagang Bilateral*. Jurnal Mahkamah, 6(2), 133-145.

menganalisis tarik-menarik antara globalisasi dan proteksionisme dalam konteks pasca pandemi.

3. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuan utamanya adalah menelaah dinamika globalisasi dan proteksionisme dalam perdagangan internasional setelah pandemi COVID-19, serta menyoroti dampaknya bagi Indonesia. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, meliputi laporan lembaga internasional seperti WTO, UNCTAD, World Bank, dan IMF, publikasi resmi kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS), artikel jurnal nasional maupun internasional, serta laporan media yang memiliki kredibilitas tinggi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan institusi resmi sehingga diperoleh gambaran menyeluruh terkait fenomena yang dikaji. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu proses interpretasi dan pengkajian informasi untuk menemukan keterkaitan antara teori perdagangan internasional dengan praktik proteksionisme di era pasca pandemi.

Keandalan hasil penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi yang berasal dari beragam referensi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya menyajikan deskripsi fenomena, tetapi juga memberikan analisis objektif mengenai ketegangan antara globalisasi dan proteksionisme dalam perdagangan dunia dan posisi Indonesia di dalamnya.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1. Globalisasi dan Proteksionisme Sebelum Pandemi

Sejak dekade 1990-an, globalisasi berkembang pesat melalui liberalisasi perdagangan, peningkatan arus investasi asing langsung (FDI), dan integrasi rantai pasok global. Namun, globalisasi juga membawa dampak negatif berupa ketimpangan ekonomi antara negara maju dan berkembang, yang memicu resistensi terhadap perdagangan bebas.⁵ Salah satu fenomena nyata adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 2018-2019, ketika kedua negara saling menerapkan tarif impor tinggi yang menandai kebangkitan proteksionisme modern.⁶ Dengan demikian, meskipun globalisasi tetap menjadi arus utama, tren proteksionisme telah muncul lebih kuat sebagai respon atas dampak sosial-ekonomi globalisasi.

Secara historis, globalisasi telah berlangsung sejak abad ke-19, ketika Revolusi Industri dan dominasi kolonial Eropa mendorong pertumbuhan perdagangan lintas negara. Gelombang kedua globalisasi lahir setelah Perang Dunia II, ditandai dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin ekonomi global. Perkembangan teknologi, transportasi, dan industri pada periode ini memperluas arus perdagangan internasional, sehingga ekspor mampu menyumbang porsi signifikan terhadap PDB dunia.

⁵ Krugman, P. (2019). *Globalization and Its Discontents Revisited*. New York: W.W. Norton & Company.

⁶ Bown, C. (2020). *US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart*. Peterson Institute for International Economics.

Gelombang ketiga globalisasi muncul seiring berdirinya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 yang memperkuat liberalisasi perdagangan melalui perjanjian multilateral. Dinamika ini semakin memperbesar keterhubungan ekonomi dan politik antarnegara, serta membuka ruang bagi aktor non-negara seperti korporasi multinasional, organisasi internasional, hingga masyarakat sipil global. Multilateralisme menjadi kerangka penting yang memberikan kepastian hukum dan mendorong kerja sama internasional lintas negara.

Namun, globalisasi tidak lepas dari sisi negatifnya. Krisis finansial 2008 menjadi titik balik berakhirnya gelombang ketiga dan melahirkan apa yang disebut sebagai “Globalisasi 4.0” yang ditandai dengan penetrasi teknologi digital. Digitalisasi mempercepat mobilitas barang, jasa, dan manusia lintas negara, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa polusi, perubahan iklim, penyebaran ideologi transnasional, serta persaingan geopolitik. Pada saat yang sama, WTO yang diharapkan menjadi penopang perdagangan justru kerap menjadi arena konflik kepentingan antarnegara. Ancaman Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat keluar dari WTO menjadi bukti bahwa globalisasi tetap menyisakan kerentanan berupa gesekan politik, ekonomi, dan teknologi. Dinamika inilah yang menjadi latar kebangkitan proteksionisme modern bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda.

4.2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perdagangan Internasional

Pandemi COVID-19 menghadirkan guncangan multidimensi yang mengguncang fondasi perdagangan global. Pada tahun 2020, ekonomi dunia mengalami kontraksi sekitar 3,5-4 persen, suatu penurunan yang setara dengan krisis ekonomi terparah sejak Perang Dunia II. Dampak langsung terlihat pada perdagangan barang dan jasa, di mana WTO melaporkan penurunan volume perdagangan global sebesar 5,3 persen, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada rantai pasok internasional seperti otomotif, elektronik, dan tekstil.² Di sisi lain, permintaan terhadap barang kesehatan dan farmasi justru meningkat tajam, menciptakan ketidakseimbangan baru dalam struktur perdagangan dunia.

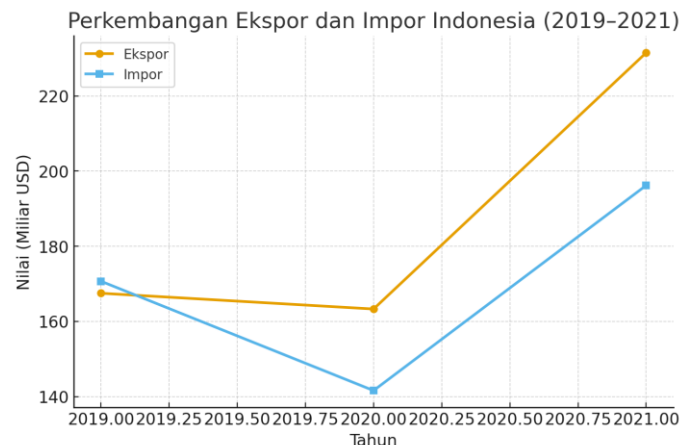
Investasi asing langsung (FDI) juga mengalami pukulan besar dengan penurunan lebih dari 40 persen pada 2020, mencerminkan kehati-hatian investor global di tengah ketidakpastian pasar. Banyak proyek investasi yang ditunda atau dibatalkan, termasuk di sektor manufaktur strategis, sehingga memperlambat proses industrialisasi di negara berkembang. Gangguan logistik akibat pembatasan mobilitas dan lockdown di berbagai negara menambah kompleksitas, memperlihatkan kerentanan sistem perdagangan yang terlalu terintegrasi dan bergantung pada “*just-in-time supply chain*”.

Indonesia tidak terlepas dari dampak tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia turun 2,6 persen pada 2020, sementara impor turun 17,3 persen akibat melemahnya permintaan domestik dan global. Penurunan ini paling terasa pada ekspor produk manufaktur seperti otomotif dan tekstil. Namun, di sisi lain, komoditas berbasis sumber daya alam seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara masih relatif bertahan, bahkan produk farmasi dan alat kesehatan mengalami peningkatan permintaan karena kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pandemi membawa kontraksi besar, ada peluang yang muncul di sektor tertentu.

Berbeda dengan perdagangan jasa yang mengalami tekanan besar, perdagangan barang global justru menunjukkan pemulihan yang lebih cepat. Prediksi WTO sebelumnya memperkirakan adanya penurunan tajam akibat pandemi, dan memang pada tahun 2020 perdagangan barang global sempat turun sekitar 5 persen. Namun, tidak lama setelah itu terjadi kebangkitan kembali. Meskipun biaya logistik, terutama angkutan laut, melonjak cukup signifikan, sektor perdagangan barang mampu pulih lebih cepat dibandingkan jasa (Dickinson &

Zemaityte, 2021). Salah satu penyebabnya adalah pergeseran konsumsi: ketika berbagai layanan jasa terbatas, belanja masyarakat dialihkan ke barang. Faktor lain yang mendorong pemulihan ini meliputi hadirnya program vaksinasi COVID-19 yang memicu pelonggaran kebijakan lockdown, paket stimulus fiskal dari pemerintah yang meningkatkan daya beli, serta inovasi dari pelaku usaha untuk bertahan di tengah krisis. Kondisi ini membuat prospek perdagangan barang global tetap optimistis untuk tumbuh lebih cepat sebagaimana diharapkan banyak negara.⁷

Selain itu, pandemi juga mempercepat munculnya sektor-sektor baru. Dua yang paling menonjol adalah industri berbasis teknologi digital serta produk dan jasa rendah karbon. Kedua bidang ini sebenarnya sudah berkembang sebelum pandemi, tetapi krisis kesehatan global mempercepat laju transformasinya. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia beradaptasi dengan memperluas digitalisasi, terutama dalam pengelolaan rantai pasok. Pada saat yang sama, konsumen semakin menyadari pentingnya keberlanjutan dan menuntut praktik produksi yang ramah lingkungan, sehingga mendorong pertumbuhan barang dan jasa dengan jejak karbon yang lebih rendah.



Selain aspek perdagangan, pandemi juga mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan proteksionis sementara, seperti larangan ekspor alat kesehatan dan vaksin pada tahap awal krisis. Kebijakan semacam ini menegaskan kembali keterbatasan mekanisme perdagangan bebas dalam menghadapi situasi darurat global, sekaligus memicu perdebatan mengenai pentingnya membangun ketahanan pasokan domestik. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi momentum untuk mempercepat program hilirisasi dan diversifikasi pasar, agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas mentah dan pasar tradisional.

Pandemi juga memperlihatkan sisi lain dari perdagangan internasional, yakni bagaimana mekanisme ini tidak hanya soal pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencerminkan ketergantungan antarnegara yang tinggi. Ketika krisis melanda, solidaritas ekonomi global diuji karena banyak negara lebih memilih melindungi kepentingan nasional daripada mendukung keterbukaan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini memunculkan urgensi untuk mengembalikan prinsip etika dalam perdagangan, seperti keadilan, transparansi, dan larangan

⁷ (Syamsul, 2021).

praktik monopoli, agar hubungan dagang tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan.⁸

4.3 Kebangkitan Proteksionisme Pasca Pandemi

Setelah fase awal krisis mereda, kecenderungan proteksionisme kembali menguat dalam perdagangan internasional. Pandemi memperlihatkan betapa rapuhnya rantai pasok global, sehingga banyak negara menata ulang kebijakan dagangnya dengan tujuan memperkuat kemandirian domestik. Hambatan non-tarif semakin sering digunakan, seperti penerapan standar teknis, aturan sertifikasi, hingga regulasi lingkungan yang ketat. Meskipun diklaim untuk melindungi keamanan nasional dan kesehatan masyarakat, kebijakan tersebut juga menjadi instrumen proteksi bagi industri dalam negeri.

Di kawasan Eropa, Uni Eropa memperkenalkan *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* yang mewajibkan produk impor mematuhi standar emisi karbon. Kebijakan ini sering dipandang sebagai bentuk proteksionisme hijau yang berpotensi menyulitkan negara berkembang dalam mengakses pasar Eropa. Sementara itu, Amerika Serikat meskipun sudah mengalami pergantian kepemimpinan, tetap mempertahankan sejumlah tarif perdagangan yang diberlakukan dalam konflik dagang dengan Tiongkok. Hal ini memperlihatkan bahwa proteksionisme pasca pandemi bukanlah kebijakan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan kepentingan domestik.

Indonesia menghadapi tantangan yang serupa. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah menjadikan Indonesia rentan terhadap kebijakan proteksionis dari mitra dagang. Kebijakan larangan ekspor nikel dan sengketa dengan Uni Eropa di WTO menjadi contoh nyata bagaimana strategi hilirisasi Indonesia berbenturan dengan aturan perdagangan global. Di sisi lain, pemerintah juga semakin aktif menggunakan langkah proteksionis terselubung, seperti kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, serta pembatasan impor di sektor tertentu untuk melindungi industri dalam negeri.

Dengan demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya mengguncang perdagangan dunia, tetapi juga mempercepat lahirnya era baru proteksionisme. Di satu sisi, kebijakan protektif dianggap penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, tren ini berpotensi memperlebar fragmentasi dalam sistem perdagangan global dan menambah kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

4.4 Rekonfigurasi *Global Value Chains* (Rantai Nilai Global)

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang signifikan bagi rantai nilai global (*global value chains*). Selama tiga dekade terakhir, rantai pasok dunia berkembang pesat dengan konsep *just-in-time production* yang menekankan efisiensi dan biaya rendah. Namun, krisis kesehatan global menunjukkan bahwa model ini sangat rentan terhadap gangguan eksternal. Ketika lockdown dan pembatasan mobilitas diterapkan, banyak sektor seperti otomotif, elektronik, dan farmasi mengalami kekurangan bahan baku sehingga produksi terhenti. Perusahaan multinasional yang sebelumnya mengandalkan pemasok tunggal dari satu wilayah mulai mengubah strategi dengan mendiversifikasi basis pemasoknya ke berbagai negara.

Selain itu, fenomena *reshoring* dan *nearshoring* mulai meningkat, di mana perusahaan memindahkan sebagian produksinya lebih dekat ke pasar konsumen atau kembali ke negara asal

⁸ Rizki, A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). *Dampak Covid-19 terhadap Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Keuangan, 15(1), 160-166.

untuk mengurangi risiko logistik. Transformasi digital juga mempercepat adopsi teknologi baru dalam rantai pasok, seperti penggunaan *blockchain* untuk transparansi, *artificial intelligence* untuk prediksi permintaan, serta *big data* untuk manajemen risiko. Hal ini menciptakan rantai pasok yang lebih adaptif dan berfokus pada ketahanan, bukan hanya efisiensi biaya.

Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, perubahan ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, ada peluang besar untuk menarik investasi baru karena perusahaan global mencari lokasi produksi alternatif di luar Tiongkok. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar berpotensi menjadi destinasi investasi. Namun, agar peluang ini terealisasi, Indonesia harus meningkatkan daya saing melalui perbaikan infrastruktur logistik, simplifikasi regulasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

4.5 Tantangan Baru bagi Negara Berkembang: Kasus Indonesia

Perubahan pola rantai nilai global pasca pandemi menghadirkan serangkaian tantangan bagi negara berkembang. Untuk Indonesia, salah satu tantangan utama adalah masih tingginya ketergantungan pada ekspor berbasis komoditas mentah seperti batubara, minyak sawit, dan karet. Ketika harga komoditas global fluktuatif, ketergantungan ini membuat neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi nasional menjadi rentan. Selain itu, kapasitas industri manufaktur Indonesia masih relatif terbatas dalam menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Hal ini membuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global cenderung berada pada level bawah, yakni sebagai penyedia bahan mentah atau produk setengah jadi.

Tantangan lain adalah aspek infrastruktur dan regulasi. Biaya logistik di Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, sehingga mengurangi daya saing ekspor. Birokrasi perizinan dan ketidakpastian regulasi juga kerap menjadi hambatan bagi investor asing. Jika tidak ada reformasi yang signifikan, Indonesia berpotensi tertinggal dalam perebutan peluang investasi yang muncul akibat restrukturisasi rantai pasok global.

Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang strategis. Diversifikasi rantai pasok global memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat hilirisasi industri, misalnya pada sektor nikel yang digunakan untuk baterai kendaraan listrik. Pembangunan kawasan industri seperti Morowali dan Halmahera menunjukkan arah ke depan bahwa Indonesia bisa naik kelas dalam rantai pasok global dengan memproduksi barang bernilai tambah lebih tinggi. Selain itu, sektor digital dan ekonomi kreatif juga bisa menjadi motor baru untuk memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global modern yang semakin mengedepankan teknologi dan keberlanjutan.

4.6 Strategi dan Kebijakan untuk Menyeimbangkan Globalisasi dan Proteksionisme

Menyeimbangkan globalisasi dan proteksionisme membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan keberlanjutan jangka panjang. Globalisasi telah membuka akses pasar, teknologi, dan investasi yang luas, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis global serta

ketimpangan antarnegara. Karena itu, strategi kebijakan harus mampu mengelola peluang sekaligus risiko yang muncul.⁹

Salah satu pendekatan yang relevan adalah memperkuat kerja sama multilateral. Dengan keterlibatan aktif dalam forum internasional seperti WTO, G20, dan ASEAN, Indonesia dapat memperbesar daya tawar sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Kolaborasi multilateral juga penting untuk menangani isu lintas batas, seperti perubahan iklim, keamanan energi, dan kesehatan global, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan domestik .

Selain itu, diperlukan penguatan diplomasi adaptif dan kebijakan berbasis nilai. Strategi ini menekankan perlunya fleksibilitas menghadapi perubahan cepat dalam perdagangan internasional, sambil tetap menjaga kepentingan jangka panjang. Kebijakan yang hanya berfokus pada proteksi tanpa melihat keterhubungan global berisiko menimbulkan isolasi, sementara keterbukaan total juga berpotensi merugikan industri dalam negeri. Karena itu, kombinasi proteksi selektif dengan keterlibatan aktif dalam perdagangan global menjadi pilihan yang paling realistis .

Dari sisi domestik, Indonesia perlu memperkuat kapasitas industri nasional melalui hilirisasi, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proteksionisme yang diterapkan secara cerdas dapat mendorong pertumbuhan sektor strategis, seperti industri berbasis nikel dan energi terbarukan, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi. Namun, kebijakan proteksi harus diimbangi dengan keterbukaan untuk investasi asing dan transfer teknologi agar industri dalam negeri tidak hanya terlindungi, tetapi juga berkembang lebih kompetitif .

Kebijakan proteksionisme juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi dan keadilan sosial. Tanpa perencanaan yang matang, proteksi dapat meningkatkan harga barang, menekan daya beli konsumen, dan menimbulkan ketidakadilan distribusi. Oleh karena itu, strategi yang lebih holistik diperlukan, termasuk memperkuat jaringan pengaman sosial, mengembangkan UMKM, dan memanfaatkan ekonomi digital sebagai pendorong inklusivitas. Dengan demikian, strategi yang seimbang menuntut adanya kombinasi antara proteksi yang selektif, partisipasi dalam perdagangan global, penguatan kapasitas domestik, serta pengelolaan dampak sosial. Hanya dengan pendekatan terpadu ini Indonesia dapat menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus tetap kompetitif dalam dinamika global yang semakin kompleks.

Kebijakan perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks domestik. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, liberalisasi penuh sering kali sulit dijalankan karena berisiko melemahkan sektor-sektor strategis yang belum kompetitif. Oleh sebab itu, pendekatan proteksionisme selektif menjadi relevan, yakni membuka diri terhadap perdagangan global sembari tetap menjaga kepentingan nasional pada sektor yang vital. Strategi ini memungkinkan integrasi dengan pasar internasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik. Selain itu, manfaat perdagangan akan lebih optimal jika tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga melibatkan UMKM agar terhubung dengan rantai nilai global. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan daya saing industri manufaktur, sehingga globalisasi tidak

⁹ Ahadiani, A., Duwy, M. P., Wergiri, S. N., & Sarpini. (2024). *Dinamika kebijakan internasional: Tantangan dan peluang di era globalisasi*. Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen, 1(4), 301-310.

hanya membuka pasar, tetapi juga mendorong peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

5. CONCLUSION

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik penting dalam dinamika perdagangan internasional, memperlihatkan bahwa globalisasi yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia juga membawa kerentanan struktural yang besar. Krisis kesehatan global tersebut mengguncang rantai pasok internasional, menurunkan volume perdagangan, dan memicu kebangkitan kembali kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Di tengah situasi ini, negara-negara mulai meninjau ulang ketergantungan mereka terhadap pasar global dan berupaya memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

Bagi Indonesia, pandemi menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi global, namun pada saat yang sama membuka ruang bagi percepatan hilirisasi dan pengembangan industri bernilai tambah. Kebijakan proteksionisme selektif yang diterapkan secara strategis dapat menjadi sarana untuk memperkuat industri nasional, asalkan tetap diimbangi dengan keterlibatan aktif dalam perdagangan global dan kerja sama multilateral.

Oleh karena itu, keseimbangan antara globalisasi dan proteksionisme menjadi kunci untuk menghadapi tantangan perdagangan dunia pasca pandemi. Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang adaptif, mengedepankan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan, sambil menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Pendekatan yang holistik menggabungkan keterbukaan terhadap pasar global dengan penguatan sektor domestik akan menjadi langkah paling efektif agar Indonesia tetap kompetitif dan berdaya saing di tengah perubahan tatanan ekonomi dunia yang semakin kompleks.

REFERENCES

- Ahadiani, A., Duwy, M. P., Wergiri, S. N., & Sarpini. (2024). Dinamika kebijakan internasional: Tantangan dan peluang di era globalisasi. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 301-310. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3363>
- Assiddiq, T. (2018). Pembuktian Teori Heckscher-Ohlin dalam Ekspor Indonesia Tahun 1986-2017. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bown, C. P. (2020). US-China trade war tariffs: An up-to-date chart. *Peterson Institute for International Economics*.
- Fadilah, C. N., dkk. (2021). Perang Dagang dan Proteksionisme: Kajian Ekonomi Politik atas Kebijakan Tarif dalam Hubungan Dagang Bilateral. *Jurnal Mahkamah*, 6(2), 133-145.
- Gozgor, G., & Ranjan, P. (2020). Globalisation, inequality and redistribution: Theory and evidence. *The World Economy*, 40(12), 2704-2751.
- Krugman, P. (2019). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Munir, K., & Bukhari, S. (2020). Impact of globalization on income inequality in Asian emerging economies. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(5/6), 495-

514.

- Nitsch, V. (2022). Lockdown policies and international trade: Evidence from the COVID-19 pandemic. *Economics Letters*, 215, 110445.
<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110445>
- Rizki, A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Dampak Covid-19 terhadap Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Keuangan*, 15(1), 160-166.
- Syamsul, H. (2021). Prospek perdagangan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Retrieved from <https://repository.upnjatim.ac.id/4980/1/Syamsul.pdf>
- UNCTAD. (2020). *Transforming Trade and Development in a Fractured, Post-Pandemic World: Report of the Secretary-General of UNCTAD to the fifteenth session of the Conference*. Geneva: United Nations.